

**EVALUASI KINERJA MANAJEMEN MELALUI ANALISIS RASIO KEUANGAN
PADA INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA UTARA**

Nina Andriany Nasution

Universitas Pembangunan Panca Budi
Email: ninaandriany@dosen.pancabudi.ac.id¹

Abstract

This research was conducted to evaluate management performance through financial ratio analysis at the North Sumatra Provincial Inspectorate during the 2023 period, to assess the regional government's ability to use financial ratios, namely the Regional Financial Independence Ratio, Effectiveness Ratio and Efficiency Ratio. This research uses secondary data with a quantitative descriptive approach, data analysis techniques using interactive models utilizing regional financial reports in North Sumatra Province. Based on the results of this research, it shows that the evaluation of management performance through the ratio of the level of independence experiences a Delegative Relationship, that there is no interference from the central government in the province of North Sumatra. Evaluate management performance through the effectiveness ratio with the effective category, that North Sumatra Province is able to realize Regional Original Income. Evaluation of management performance through efficiency ratios with efficient criteria so that regional financial management in North Sumatra Province can achieve targets.

Keywords: *Management Performance Evaluation, Financial Ratio Analysis, Independence Ratio, Effectiveness Ratio and Efficient Ratio.*

1. PENDAHULUAN

Evaluasi kinerja keuangan merupakan proses yang dilakukan oleh pemerintah daerah secara berkala agar dapat memahami kondisi keuangan internal. Tujuannya adalah mendapatkan pemahaman akurat tentang kesehatan keuangan, mengevaluasi kinerja keuangan yang tercapai, dan mengidentifikasi masalah yang memengaruhi kelanjutan anggaran pemerintah daerah. Manajemen juga tidak dapat mengenali potensi kekurangan atau kelebihan dalam penggunaan sumber keuangan, mengidentifikasi tren, serta mengukur efektivitas dan efisiensi secara strategis.

Manajemen keuangan berhubungan dengan proses, lembaga, pasar dan instrumen yang terlibat dalam transfer uang, di antara individu maupun antara bisnis dan pemerintah. Manajemen keuangan dalam banyak hal juga berpengaruh pada pengambilan keputusan sebuah masalah instansi. Keputusan yang berkaitan dengan keuangan yaitu berupa asset yang dibutuhkan dan penggunaan dana seefisien mungkin.

Analisis rasio keuangan dengan menggunakan perhitungan dan perbandingan atas data kuantitatif yang ditunjukkan dalam neraca maupun laba rugi. Indikator keuangan yang menunjukkan perubahan dalam kondisi keuangan atau operasi di masa lalu dan membantu menggambarkan pola perubahan tersebut, untuk kemudian menunjukkan risiko dan peluang yang melekat pada pemerintah daerah bersangkutan. Analisis yang dilakukan dengan menghubungkan berbagai pemikiran yang ada pada laporan keuangan dalam bentuk rasio keuangan yaitu Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi.

Inspektorat Provinsi Sumatera Utara merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Inspektur yang mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Secara faktual banyak

pejabat eselon, anggota DPR, dan kepala daerah di Sumatera Utara yang tersandung kasus penyalahgunaan anggaran. Sistem birokrasi yang panjang dan berbelit-belit menjadi salah satu kondisi pendukung tindakan fraud atau kecurangan pada lingkungan pemerintah. Sistem otonomi daerah tidak didukung dengan mekanisme pengendalian yang kuat sehingga akhirnya fraud menjadi hal yang biasa dilakukan oleh pemerintah daerah karena minimnya pengawasan. Peran Auditor dipertanyakan bahwa dalam melaksanakan tugas auditor hanya untuk memenuhi ketentuan hukum bukan karena adanya pemahaman akan peran auditor dalam mewujudkan transparansi dan evaluasi penggunaan anggaran. Dalam melaksanakan audit laporan keuangan pemerintah daerah maka auditor harus terlebih dahulu memastikan bahwa laporan keuangan sudah sesuai dengan standart akuntansi keuangan, kecukupan bukti, sistem pengendalian internal dan ketaatan perundang-undangan.

2. LANDASAN TEORI

2.1 Evaluasi Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan pemerintah daerah pada suatu periode tertentu menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana, yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas. Kinerja keuangan yang baik akan menghasilkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang maksimal sehingga memiliki tingkat pengembalian investasi yang tinggi. Kinerja keuangan pemerintah daerah juga memperlihatkan kemampuan dalam memberikan keuntungan dari aset, ekuitas, maupun hutang.

Mengukur kinerja keuangan diperlukan indikator atau instrumen keuangan yang akan digunakan, instrumen tersebut adalah pos-pos keuangan yang ada pada laporan keuangan baik laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan operasional yang diperoleh dari annual report. Laporan keuangan digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan dari waktu ke waktu. Dengan membandingkan laporan keuangan dari periode sebelumnya, manajer dan pemangku kepentingan dapat melihat perubahan dan tren yang terjadi dalam kinerja keuangan.

Evaluasi kinerja keuangan merupakan proses yang dilakukan secara berkala agar dapat memahami kondisi keuangan internal. Tujuannya adalah mendapatkan pemahaman akurat tentang kesehatan keuangan, mengevaluasi kinerja keuangan yang tercapai, dan mengidentifikasi masalah yang memengaruhi kelanjutan kemandirian pemerintah daerah provinsi sumatera utara. Keberhasilan evaluasi kinerja keuangan berpotensi menginspirasi perubahan guna memperoleh keunggulan kompetitif. Selain itu, membantu mengatasi hambatan, sehingga merangsang pertumbuhan dan mencapai tujuan kinerja keuangan yang baik.

2.2 Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan merupakan kegiatan yang mencakup perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian, dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Demi kelancaran dan keberlangsungan kemandirian dalam jangka waktu lama, diperlukan manajemen keuangan yang dilakukan secara matang. Penerapan manajemen keuangan dapat membantu dalam mencegah membengkaknya pengeluaran, mencapai tujuan keuangan, meminimalisir risiko keuangan, mobilisasi keuangan, keberlangsungan hidup pemerintah daerah, serta membantu pengambilan keputusan keuangan.

Manajemen keuangan mengelola arus kas masuk dan keluar pada laporan realisasi anggaran pemerintah daerah. Ini termasuk mengelola pendapatan dari pendapatan asli daerah, pajak dan retribusi daerah serta belanja daerah yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Tujuannya adalah menjaga likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban keuangan sehari-hari. Manajemen keuangan pemerintah daerah sangat

penting karena agar dapat memperoleh data untuk membuat visi, menentukan keputusan investasi, serta memiliki wawasan berinvestasi, mengontrol likuiditas, kas, dan lainnya.

Manajemen keuangan dapat membantu secara maksimal dalam memperoleh keuntungan dengan memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Mengelola Keuangan

Manajemen keuangan berfungsi sebagai pengelola keuangan melalui perencanaan pemasukan dan pengeluaran dana dalam periode tertentu, hingga membuat laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan operasional yang diperoleh selama periode tersebut. Dalam manajemen keuangan, anggaran dana yang masuk maupun keluar dicatat secara terperinci agar penggunaan dana dapat berjalan lebih maksimal. Sebab, perencanaan yang tepat akan membantu pemerintah daerah memperkirakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang akan dihadapi.

2. Mengendalikan Keuangan

Setelah melakukan perencanaan keuangan, perlu dilakukan evaluasi untuk mengendalikan keuangan. Apabila terdapat hal yang tidak sejalan dengan rencana awal, maka dapat menggunakan data keuangan tersebut sebagai acuan untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya.

3. Memeriksa Keuangan

Audit atau pemeriksaan keuangan untuk memastikan bahwa keuangan di pemerintah daerah sudah dikelola dengan baik dan berjalan tanpa ada penyalahgunaan dana. Manajemen keuangan yang dijalankan dengan baik tentunya dapat membantu untuk memeriksa kondisi keuangan yang dijalankan, sehingga meminimalisir adanya penyimpangan dalam keuangan.

4. Melaporkan Keuangan

Menyediakan informasi tentang keuangan secara bertahap dan rutin, mulai dari laporan keuangan kuartal, semester, hingga tahunan.

Manajemen dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, meningkatkan kualitas produk dan layanan, memperkuat citra dan reputasi, dan meningkatkan daya saing dan pertumbuhan. Karena manajemen keuangan bertujuan untuk mengelola biaya operasional dan keuangan secara efisien. Ini melibatkan pengelolaan pengeluaran agar tetap sesuai dengan pendapatan dan menghindari pemborosan.

Manajemen keuangan pemerintahan adalah manajemen dana, baik yang berkaitan dengan usaha pengumpulan dana maupun penggunaan dana untuk pembiayaan operasional maupun untuk kebutuhan investasi secara efektif dan efisien. Dituntut secara efektif dan efisien karena dana itu adanya sangat terbatas dan manajemen itu sangat mahal harganya karena memerlukan peran organisasi, koordinasi, pengarahan dan evaluasi yang baik.

2.3 Rasio Keuangan

Analisis rasio keuangan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari suatu periode dengan periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui kecenderungan yang terjadi. Beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk kinerja keuangan daerah (Mahmudi, 2016:140-142) yang meliputi:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang dikeluarkan daerah. Selain itu, tingkat kemandirian keuangan daerah juga menunjukkan tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi). Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah

pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya. Formula untuk mengukur tingkat kemandirian daerah adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/ Provinsi dan Pinjaman}} \times 100\%$$

Tabel 2.1 Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Tinggi	> 100%	Delegatif
Sedang	70% - 100%	Partisipatif
Rendah	40% - 69%	Konsultatif
Rendah Sekali	< 40%	Instruktif

Sumber: Siktania MD, Henrikus H (Manajemen Keuangan Daerah, 2022)

- Pola Hubungan Delegatif: Campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.
- Pola Hubungan Partisipatif: Peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
- Pola Hubungan Konsultatif: Campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi.
- Pola Hubungan Instruktif: Peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).

2. Rasio Efektivitas

Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Rasio efektifitas pendapatan asli daerah dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dengan target penerimaan pendapatan asli daerah (dianggarkan). Perhitungan rasio efektifitas dapat dilakukan dengan:

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Secara umum, nilai efektifitas pendapatan asli daerah dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 2.2 Kriteria Penilaian Efektivitas

Nilai Efektivitas	Rasio (%)
Sangat Efektif	> 100%
Efektif	80% - 100%
Cukup Efektif	60% - 79%
Kurang Efektif	40% - 59%
Tidak Efektif	< 40%

Sumber: Siktania MD, Henrikus H (Manajemen Keuangan Daerah, 2022)

3. Rasio Efisiensi

Dalam menjalankan roda pemerintahan, pemerintah dituntut untuk bisa melaksanakan setiap kegiatan dengan efisien. Untuk mengetahui suatu kegiatan pemerintah apakah sudah terlaksana dengan efisien atau tidak, maka bisa dilihat dari rasio efisiensi berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2.3 Kriteria Rasio Efisiensi

Kriteria Efisiensi	Rasio (%)
Efisien	> 100%
Cukup Efisien	70% - 100%
Tidak Efisien	< 70%

Sumber: Siktania MD, Henrikus H (Manajemen Keuangan Daerah, 2022)

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan adalah penelitian deskriptif kuantitatif, Menurut Sugiyono (2015), “Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lainnya”. Menurut Sugiyono (2018), “Metode kuantitatif merupakan suatu metode penelitian berdasarkan filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya”.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Data Sekunder yaitu data/ dokumen yang diperoleh dalam bentuk laporan keuangan serta dokumen lain yang relevan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: Dokumentasi yaitu sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/ tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan sebagainya.

Teknik dalam menganalisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan model interaktif dari Miles dan Huberman yaitu:

- Pengumpulan Data:** merupakan kegiatan mencari data di lapangan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Validitas instrumen pengumpulan data serta kualifikasi pengumpul data sangat diperlukan untuk memperoleh data yang berkualitas.
- Reduksi Data:** merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.
- Penyajian Data:** merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Data disajikan harus sederhana dan jelas agar mudah dibaca.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**4.1 Hasil Penelitian****Tabel 4.1 APBD Se-Prov. Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023**

Akun	Anggaran/Pagu	Realisasi	%
Pendapatan Daerah	61.105,35 M	57.055,42 M	93.37
PAD	16.165,04 M	13.437,36 M	83.13
Pajak Daerah	12.883,31 M	10.862,05 M	84.31
Retribusi Daerah	706,57 M	412,42 M	58.37
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	712,89 M	645,27 M	90.51
Lain-Lain PAD yang Sah	1.862,27 M	1.517,62 M	81.49
TKDD *)	41.293,75 M	40.244,05 M	97.46
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	41.293,75 M	40.244,05 M	97.46
Pendapatan Lainnya	3.646,56 M	3.374,02 M	92.53
Pendapatan Transfer Antar Daerah	2.915,51 M	2.829,82 M	97.06
Pendapatan Hibah	193,94 M	189,07 M	97.49
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	537,12 M	355,13 M	66.12
Belanja Daerah	64.005,51 M	58.338,86 M	91.15
Belanja Pegawai	22.359,29 M	19.575,67 M	87.55
Belanja Pegawai	22.359,29 M	19.575,67 M	87.55
Belanja Barang dan Jasa	16.101,43 M	15.531,56 M	96.46
Belanja Barang dan Jasa	16.101,43 M	15.531,56 M	96.46
Belanja Modal	11.987,67 M	10.408,85 M	86.83
Belanja Modal	11.987,67 M	10.408,85 M	86.83
Belanja Lainnya	13.557,12 M	12.822,79 M	94.58

Akun	Anggaran/Pagu	Realisasi	%
Belanja Bunga	75,42 M	63,96 M	84.80
Belanja Subsidi	2,69 M	2,71 M	100.79
Belanja Hibah	3.218,75 M	2.991,89 M	92.95
Belanja Bantuan Sosial	186,75 M	154,18 M	82.56
Belanja Tidak Terduga	517,33 M	131,85 M	25.49
Belanja Bagi Hasil	2.873,09 M	2.848,71 M	99.15
Belanja Bantuan Keuangan	6.683,09 M	6.629,48 M	99.20
Surplus/(Defisit)	-2.900,16 M	-1.283,43 M	44.25
Pembiayaan Daerah	2.902,47 M	3.849,11 M	132.62
Penerimaan Pembiayaan Daerah	3.167,72 M	3.986,33 M	125.84
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	3.124,61 M	3.976,40 M	127.26
Penerimaan Pinjaman Daerah	41,71 M	3,68 M	8.81
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1,40 M	6,26 M	447.22
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	265,25 M	137,22 M	51.73
Penyertaan Modal Daerah	165,89 M	47,08 M	28.38
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	98,36 M	89,13 M	90.62
Pemberian Pinjaman Daerah	1,00 M	1,00 M	100.00

Sumber: <https://djpk.kemenkeu.go.id> (2023)

4.1.1 Analisis Rasio Keuangan

1. Rasio Kemandirian

Pendapatan Asli Daerah

Bantuan Pemerintah Pusat/ Provinsi dan Pinjaman

$$\frac{13.437,36 \text{ M}}{3.986,33 \text{ M}} \times 100\% = 337\%$$

2. Rasio Efektivitas

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

$$\frac{13.437,36 \text{ M}}{16.165,04 \text{ M}} \times 100\% = 83\%$$

3. Rasio Efisiensi

$$\frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

$$\frac{58.338,86 \text{ M}}{57.055,42 \text{ M}} \times 100\% = 102\%$$

4.1.2 Evaluasi Kinerja Manajemen

1. Terdapat tingkat kemandirian dengan Pola Hubungan Delegatif, bahwa campur tangan pemerintah pusat pada provinsi sumatera utara sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah dengan kemampuan keuangan tinggi sebesar 337%.
2. Memiliki nilai efektivitas pendapatan asli daerah dengan kategori efektif sebesar 83%, bahwa kemampuan provinsi sumatera utara dalam merealisasikan penerimaan pendapatan asli daerah berdasarkan potensi riil daerah.
3. Kegiatan operasional provinsi sumatera utara sudah terlaksana dengan efisien sebesar 102%, maka semakin tinggi rasio efisien menunjukkan pemerintah daerah semakin efisien dalam pengelolaan keuangan daerahnya.

4.2 Pembahasan

Analisis Rasio Kemandirian Daerah, sudah mampu mencapai kemandirian daerah terlihat bahwa baiknya dalam mengatasi penerimaan pendapatan dengan yang ditargetkan sehingga tidak ada ketergantungan dana bagi hasil dan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat. Hal ini dikemukakan angka rasio Kemandirian Daerah ditahun 2023 sebesar 337%, menunjukkan kriteria > 100% tinggi.

Analisis Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), mampu mencapai tujuan secara tepat atau tepat sasaran dengan mengatasi penerimaan pendapatan sesuai dengan yang ditargetkan dalam merealisasikan dan pemanfaatan penerimaan sektor pajak dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah direncanakan. Hal ini dikemukakan angka Rasio Efektivitas PAD ditahun 2023 sebesar 83%, menunjukan kriteria 80% - 100% efektif.

Analisis Rasio Efisiensi pada belanja daerah digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam memberikan pelayanan yang lebih baik dan berkualitas. Hal ini dikemukakan angka Rasio Efisiensi belanja daerah ditahun 2023 sebesar 102%, menunjukan kriteria > 100% efisien.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Evaluasi kinerja manajemen keuangan daerah dapat melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan,

penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak, dan mengembangkan sistem jaminan sosial.

2. Semakin tinggi kontribusi Pendapatan Asli Daerah maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Daerah semestinya tidak mengandalkan dana transfer sebagai sumber dana utama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, melainkan menggunakan Pendapatan Asli Daerah.
3. Semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kinerja yang baik dalam merealisasikan target yang telah direncanakan.
4. Semakin tinggi tingkat efisien pemerintah daerah maka pengelolaan keuangannya dapat mencapai target. Belanja daerah akan memberikan pelayanan yang lebih baik dan berkualitas kepada masyarakatnya serta mampu mengupayakan capaian hasil kerja dari perencanaan alokasi biaya yang telah ditetapkan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

- 1) Inspektorat Provinsi Sumatera Utara

Dalam APBD Se-Prov. Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023, realisasi Pendapatan Asli Daerah sebaiknya mengupayakan penerimaan pendapatan melebihi jumlah yang dianggarkan dan lebih meningkatkan efektivitas dalam penggunaan PAD.

- 2) Bagi Peneliti Selanjutnya.

Peneliti Selanjutnya lebih mendalami mengenai kinerja realisasi keuangan pada Pemerintah Daerah dan menggunakan lebih banyak rasio lagi sehingga hasil penelitiannya bisa lebih andal dan akurat juga diharapkan ruang lingkup yang lebih luas dari penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, Syam Kusufi. (2012). *Akuntansi Sektor Publik Teori Konsep Dan Aplikasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Adisasmita, Rahardja. (2014). *Pengelolaan Pendapatan & Belanja Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ardon Fridolin Honga dan Ventje Ilat. (2014). *Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bitung*. Jurnal ISSN (2303-1174) Hlm. 279-282.
- Christian, Lintje, Natalia. (2017). *Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota Tomohon*. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12 (2), 782-791
- Espinoza. (2014). *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan*. Universitas Sumatera Utara Medan.
- Hermi, Oppier. (2013). *Analisis Pengaruh Pelaksanaan Otonomi Daerah Terhadap Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara*. Jurnal Benchmark Volume 2 November 2013.
- Jandi, Ibnu. (2014). *Kajian Atau Analisis Rasio Anggaran Pendapatan Daerah Pada APBD 2014 Di 34 Provinsi Dalam Wilayah NKRI*. Kompasiana.com.

- Joko Pramono. (2014). *Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Kasus Di Pemerintah Kota Surakarta*. Surakarta: STIE AMA.
- Judy Julian, Jenny. (2017). *Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Manado Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2011-2015*. Jurnal Accountability, Volume 06, Nomor 01, 45-56.
- Mentari Kurnia dan Ririn Irma. (2016). *Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi*. Jurnal ISSN.
- Marratus Sholikhah. (2017). *Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya*. Universitas 17 Agustus 1945.
- Mohammad, Mahsun. (2012). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Nabila Astriana, Muhibtari. (2014). *Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Magelang Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2008-2012*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Oliviana, Juntje, Dhullo. (2019). *Analisis Penilaian Kinerja Sektor Publik Studi Kasus Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Tenggara*. Jurnal EMBA, Vol. 7 No. 3.
- Risky, Puput. (2015). *Analisis Rasio Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2013*. Universitas Negeri Yogyakarta.